

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS BERKELANJUTAN DI DESA BEDAGUNG DAN TAPEN KABUPATEN MAGETAN

IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE QUALITY FAMILY VILLAGE PROGRAM IN BEDAGUNG AND TAPEN VILLAGES, MAGETAN REGENCY

Lisa Suryati¹, Yusuf Adam Hilman², Bambang Triono³, Irvan Nur Ridho⁴
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: lisasuryatipenting19@gmail.com, adam_hilman@umpo.ac.id, bambangtri635@gmail.com, irvaannurridho@gmail.com

ABSTRACT

Bedagung Village and Tapen Village are the implementers of the Quality Family Village (Kampung Keluarga Berkualitas) Program in Magetan Regency. These two villages are both classified as sustainable, but in their implementation, they have varying outputs. Therefore, this research is important to understand how the program is implemented in each village. This study aims to analyze the implementation of the Sustainable Quality Family Village Program in Bedagung Village and Tapen Village, Magetan Regency. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The technique for determining informants combines two methods: snowball and purposive sampling. This study employs Edward III's Public Policy Implementation Theory to analyze the data. The results show that the implementation of the Sustainable Quality Family Village Program in Bedagung Village and Tapen Village, Magetan Regency, has successfully improved the quality of life of their communities. The communication carried out aligns with the dimensions of clarity and consistency. Its implementation is also supported by trained human resources as well as adequate financial support and facilities. Additionally, there is a clear commitment among policy implementers and a new bureaucratic structure that facilitates the program's execution. Despite some challenges, such as a shortage of PLKB officers, the program has progressed with cross-sectoral support and active community participation.

Keywords: *Implementation, Community Empowerment, Kampung Keluarga Berkualitas*

ABSTRAK

Desa Bedagung dan Desa Tapen merupakan pelaksana Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Magetan. Dua Desa ini sama-sama terklasifikasi berkelanjutan, tetapi dalam pelaksanaannya desa-desa ini memiliki output yang berbedaa-beda, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program di masing-masing Desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas Berkelanjutan di Desa Bedagung dan Desa Tapen Kabupaten Magetan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi dandokumentasi untuk teknik pengumpulan datanya. Teknik penentuan informan ini dengan menggabungkan 2 teknik yaitu snowball dan purposive sampling. Penelitian

ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik oleh Edward III untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Berkelanjutan di Desa Bedagung dan Desa Tapen Kabupaten Magetan telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dalam pelaksanaannya Komunikasi yang dijalankan telah sesuai dengan dimensi kejelasan dan konsistensi, dalam pelaksanaannya juga telah didukung oleh SDM yang terlatih serta adanya dukungan finansial dan fasilitas yang mencukupi. Serta adanya komitmen yang jelas antar pelaksana kebijakan dan dengan adanya struktur birokrasi baru yang melancarkan pelaksanaan program Meskipun ada beberapa tantangan, seperti kekurangan Petugas PLKB, program ini telah berjalan dengan dukungan dan kerjasama lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat, Kampung Keluarga Berkualitas.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini menempati posisi keempat dunia dengan presentase jumlah penduduk yang tinggi. Penduduk merupakan sekelompok orang yang saling berkelompok dan bermukim di suatu wilayah tertentu. Penduduk suatu asset yang penting bagi berkelangsungan suatu negara, maka penduduk ini menjadi suatu unsur yang penting dalam berdirinya suatu negara. Saat ini laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi masalah yang harus segera diselesaikan terutama untuk negara-negara berkembang terkhususnya di Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting untuk segera mengendalikan laju pertumbuhan di Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat (Hakim, 2023).

Permasalahan kependudukan menjadi suatu hal umum yang harus dituntaskan segera oleh pemerintah, mengingat peran serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek yang cukup besar. Upaya pemerintah Indonesia dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satunya dengan telah menerapkan program kampung keluarga berkualitas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dimulai dari tingkat desa. Program ini dilaksanakan guna meningkatkan kualitas penduduk dengan adanya berbagai kegiatan rutin berbasis pemberdayaan, dengan cara memaksimalkan peningkatan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat terkhususnya dalam aspek peningkatan kualitas

kesehatan hingga kondisi sosial ekonomi. Upaya untuk terus memaksimalkan pelaksanaan program Keluarga Berkualitas tentu menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah saat ini (Syawal, 2019).

Kampung Keluarga Berkualitas dimulai dari jenjang desa/kelurahan yang terintegrasi dalam rangka pemberdayaan serta penguatan institusi keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Kampung Keluarga Berkualitas adalah suatu wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu yang mengintegrasikan program pembangunan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk dan mengatasi masalah seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi serta mengurangi kemiskinan. Kegiatan dalam Kampung Keluarga Berkualitas meliputi pembentukan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Selain itu, program ini juga fokus pada peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui delapan fungsi keluarga serta penyediaan Rumah Dataku, yaitu pusat data kependudukan Kampung Keluarga Berkualitas (Syabani, 2021).

Menurut UU No.52 Tahun 2009, yang menjadi landasan dalam pelaksanaan program

kependudukan dan keluarga berencana. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ini menekankan bahwa wewenang BKKBN tidak hanya terbatas pada pembangunan kampung keluarga berkualitas, tetapi juga mencakup pengendalian penduduk. Program ini merupakan sebagai langkah dari BKKBN dalam melaksanakan agenda prioritas yaitu Nawacita ke 3, 4 dan 5 untuk mewujudkan suatu kampung Keluarga Berkualitas. Dengan pelaksanaan agenda prioritas ini sehingga dapat membangun Indonesia dimulai dari pinggiran, yaitu dengan memperkuat daerah-daerah terkhususnya desa dalam suatu kerangka Negara Kesatuan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan melakukan peningkatan karakter masyarakat dengan adanya kebijakan penataan kurikulum pendidikan, penguatan program Kependudukan serta Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP).

Kampung Keluarga Berkualitas dimulai dari jenjang desa/kelurahan yang terintegrasi dalam rangka pemberdayaan serta penguatan institusi keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pada mulanya dalam pembentukan program Kampung KB ini merupakan Kampung Keluarga Berencana, namun setelah terbitnya surat edaran dari Mendagri mengenai Kampung Keluarga Berkualitas maka dirubahlah nama yang dulunya Kampung Keluarga Berencana dirubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung keluarga berkualitas ini merupakan sebuah model percepatan pembangunan keluarga yang terhubung melalui pendekatan individu, keluarga dan masyarakat. Dengan adanya kampung KB ini diharapkan dapat menghasilkan keluarga Indonesia sebagai keluarga berkualitas, mandiri, bahagia dan tentram serta memiliki kontribusi pada pembangunan Negara (Timisela, 2023). Sumber daya manusia adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena jika sumber daya manusia kurang berdaya maka akan berdampak pada kehidupan atau

keseharian mereka (Ibrahim & Zulhijjah, 2023). Hal tersebutlah yang membuat program Kampung Keluarga Berkualitas ini harus dilakukan yang didasarkan pada pembangunan sumber daya manusianya.

Kampung Keluarga Berkualitas menjadi sebuah inovasi yang dinilai cukup strategis yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemberdayaan serta mengedukasi masyarakat secara nyata di lapangan. Menurut jurnal Alfano & Hasyim (2023) pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Pangkalpinang untuk pencegahan stunting berjalan dengan baik, namun mengalami kendala seperti pelaksanaan Dapur Sehat yang belum sesuai harapan, hanya terbatas pada penyebaran informasi menu untuk balita yang berisiko stunting. Apriyanto (2023) juga menemukan bahwa implementasi program ini di Kota Balikpapan berjalan baik menurut teori George Edward III, namun terdapat kendala yang memerlukan koordinasi dengan OPD lain untuk memperkuat kegiatan. Purba (2023) menemukan bahwa program ini berjalan baik di Desa Tanjung Rejo, tetapi masih ada kekurangan seperti infrastruktur yang kurang memadai dan perlunya peningkatan kerjasama lintas sektor serta kesadaran masyarakat. Penelitian ini, yang juga membahas implementasi Kampung Keluarga Berkualitas, memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya dalam hal lokasi, teori yang digunakan, dan fokus penelitian, yang menghasilkan data yang berbeda.

Salah satu kabupaten yang sudah menerapkan Program Kampung Keluarga Berkualitas ini adalah Kabupaten Magetan. Pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Magetan tidak lepas dari konteks lokal yang unik. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan masyarakat, keberagaman budaya akan mempengaruhi implementasi program ini. Di Kabupaten Magetan sendiri perlu penyesuaian untuk pendekatan pelaksanaan program dengan kondisi setempat agar program ini dapat mencapai hasil

yang optimal. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Magetan menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, perbedaan dalam tingkat partisipasi masyarakat (Diskominfo, 2023).

Kabupaten Magetan harus melaksanakan Program Keluarga Berkualitas sesuai dengan kebijakan BKKBN. Perbedaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya di berbagai daerah menyebabkan hasil yang berbeda dari program yang sama. Dari 188 desa yang menjalankan program di Kabupaten Magetan, mayoritas berada pada status dasar, yaitu 103 desa, 24 desa pada tingkat berkembang, 58 desa pada tingkat mandiri, dan 50 desa pada tingkat berkelanjutan. Di antara 50 desa berkelanjutan, Desa Bedagung dan Desa Tapen menjadi fokus penelitian. Program Kampung Keluarga Berkualitas memiliki empat indikator kualitas: Indeks iBangga, angka stunting rendah, status IDM (Indeks Desa Membangun), dan jumlah keluarga miskin. Indeks iBangga di Kabupaten Magetan berada pada level siaga dengan capaian 58,55. Di Desa Tapen, 29,5% keluarga termasuk dalam status keluarga sejahtera, sementara di Desa Bedagung terdapat 320 keluarga prasejahtera dari total 620 KK. Status IDM di Desa Tapen adalah Maju, sedangkan Desa Bedagung adalah desa Mandiri. Pada 2023, Desa Tapen tidak memiliki balita stunting, sedangkan Desa Bedagung memiliki 31 balita stunting, sama dengan jumlah tahun sebelumnya.

Penelitian ini penting karena kedua desa tersebut, meskipun sama-sama berstatus berkelanjutan, menunjukkan hasil yang berbeda dalam indikator keberhasilan Kampung KB. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti sejauh mana implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Magetan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Kampung Keluarga Berkualitas Berkelanjutan di Desa Bedagung dan Desa Tapen Kabupaten Magetan.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik sebuah fenomena (Creswell, 2014). Lokasi penelitian ini terletak di Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Bedagung Kecamatan Panekan dan Desa Tapen Kecamatan Lembeyan. Penelitian ini menggabungkan 2 teknik penentuan informan yaitu *purposive* dan *snowball sampling*. Penggabungan 2 teknik ini sebagai pertimbangan bahwa informan mengetahui dan terlibat langsung dalam proses implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, Petugas PLKB Kecamatan Lembeyan dan Panekan, Pemerintah Desa Bedagung dan Tapen serta masyarakat di Desa Bedagung dan Tapen.

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, dalam penelitian menggunakan 3 teknik yaitu Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Dengan menggunakan triangulasi metodologi sebagai pemeriksaan keabsahan data. Teknik ini untuk pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu dari luar data untuk pengecekan sebagai pembanding data dengan menggunakan sumber data dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi (Denzin, 1978). Metode yang digunakan untuk analisis data menggunakan Miles *et al* (2014) yaitu dengan beberapa langkah proses analisis data berupa, Pengumpulan data, Kondensasi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sudah di definisikan. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan Publik. Teori Implementasi kebijakan ini akan mengetahui bagaimana pelaksanaan atau

implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di Kabupaten Magetan. Dimana implementasi sendiri berarti suatu proses atau kegiatan yang diharapkan dapat mencapai tujuan ataupun menjalankan kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut teori Edward III ini berfokus terhadap 4 faktor yang dapat menggambarkan proses implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas Berkelanjutan di Desa Tapen dan Desa Bedagung Kabupaten Magetan.

Pertama, Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah komunikasi yang terjadi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak, Petugas PLKB, Pemerintah Desa hingga ke Masyarakatnya mulai dari perencanaan pelaksanaan program. Untuk mengukur komunikasi ini menggunakan dimensi transmisi, kejelasan dan konsistensi. Kedua, Sumberdaya dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas ini dimulai dari Sumber Daya Manusianya hingga sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya program, seperti Kader, masyarakatnya dan fasilitas kesehatan yang ada di Desa Bedagung dan Desa Tapen. Hal ini dengan memastikan Sumberdaya yang ada bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Ketiga, Disposisi berarti bagaimana langkah-langkah penyampaian kewenangan yang dilakukan yang dimulai dari DPPKBPPPA ke PLKB Kecamatan Panekan dan Lembeyan hingga sampai ke Desa Pelaksana program yaitu, Desa Bedagung dan Tapen. Keempat, Struktur Birokrasi disini berarti dalam implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas mendorong adanya struktur baru yang dibentuk. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat Kelompok Kerja baru mulai dari tingkat kabupaten dan ditingkat Desa Bedagung dan Desa Tapen Dimana para penyelenggara kebijakan ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

George Edward III (1980) dalam Syahrudin (2019) menyatakan bahwa masalah utama dalam kebijakan public terletak pada kurangnya perhatian terhadap implementasi. Oleh karena hal itu, Edward III menyarankan bahwa dalam implementasi kebijakan untuk memperhatikan 4 isu pokok yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokasi.

1. Komunikasi

Pada tahap awal, komunikasi dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan melalui sosialisasi. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan pertama-tama mensosialisasikan program ini kepada PLKB di tingkat kecamatan. Setelah menerima sosialisasi dari dinas, PLKB meneruskannya kepada kader-kader di desa, yang kemudian menyampaikan program tersebut kepada masyarakat. Setelah sosialisasi awal, program ini dilanjutkan dengan pertemuan rutin antara kelompok kerja dan kelompok kegiatan.

2. Sumber Daya

Untuk mendukung keterlaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Bedagung dan Desa Tapen, diperlukan sumber daya yang memadai. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana, sebagaimana dijelaskan oleh Edward III dalam Tjilen (2019). Sumber daya manusia mencakup kualitas dan kuantitas personel yang terlibat, termasuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang aktif dalam pembinaan masyarakat dan program tribina (BKB, BKL, BKR). Selain itu, kader dan masyarakat juga berperan penting dalam menyampaikan informasi dan mendukung pelaksanaan program, menunjukkan keterlibatan aktif di tingkat desa. Namun, saat ini Kabupaten Magetan menghadapi kekurangan SDM pada Petugas PLKB. Di Desa

Tapen, kader dan masyarakat, dengan dukungan dari pemerintah desa, menunjukkan kolaborasi yang baik.

Dari segi dana, program ini didukung oleh Dana Desa (ADD) dan swadaya masyarakat. Sarana dan prasarana di desa-desa tersebut juga mendukung implementasi program. Desa Bedagung memiliki fasilitas yang baik, termasuk kantor sekretariat, rumah dataku, serta kelompok aktif seperti BKB, BKL, BKR, PIK-R, dan UPPKS. Di Desa Tapen, sarana kesekretariatan yang lengkap dengan kantor dan pengurus, didukung oleh dana dari ADD, menunjukkan bahwa fasilitas yang ada memadai untuk mendukung pelaksanaan program. Selain itu, fasilitas kesehatan di Desa Tapen dan Bedagung seperti polindes, posyandu Balita, posbindu, dan posbindu lansia mendukung program kesehatan dalam Kampung Keluarga Berkualitas.

3. Disposisi

Dalam pelaksanaan kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Magetan, khususnya di Desa Bedagung dan Desa Tapen, Dinas DPPKBPPPA sebagai leading sector menunjukkan komitmen dengan bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Kerjasama lintas sektoral yang melibatkan pemerintah desa, Polsek, Babinsa, Puskesmas, KUA, kader-kader, dan tokoh masyarakat menunjukkan sikap positif dan keterbukaan dari para pelaksana dalam mendukung tujuan program. Penerimaan masyarakat terhadap program ini menunjukkan dinamika yang berkembang. Pada tahap awal, masyarakat masih dalam proses menerima program ini. Namun, seiring dengan pelaksanaan program, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keluarga berkualitas mulai meningkat.

4. Struktur Birokrasi

Dalam melaksanakan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Magetan,

terdapat Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat kabupaten dengan DPPKB sebagai leading sector. Struktur ini melibatkan berbagai dinas terkait atau lintas sektor, menunjukkan adanya organisasi yang terstruktur dan terintegrasi dengan baik untuk mendukung implementasi program. Struktur kepengurusan Pokja di tingkat desa, seperti di Desa Tapen dan Desa Bedagung, menunjukkan adanya prosedur operasional yang teratur. Pokja di tingkat desa bertanggung jawab melaksanakan program-program yang telah direncanakan dan ditentukan. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap kegiatan dan program dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan didasarkan pada teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III. Dalam hal ini ada beberapa Indikator untuk menilai keberhasilan Implementasi Kebijakan dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di Kabupaten Magetan yaitu, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Pada tahap awal komunikasi yang dijalankan adalah dengan adanya sosialisasi yang dilakukan. Sebagai tingkat pertama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan mensosialisasikan program ini kepada PLKB ditingkat Kecamatan. Setelah menerima sosialisasi dari dinas, PLKB melanjutkan sosialisasi kepada kader-kader yang ada di Desa. Kader kemudian mensosialisasikan program Kampung Keluarga Berkualitas ini kepada masyarakat. Setelah sosialisasi awal pelaksanaan program ini, kemudian dilanjutkan dengan adanya pertemuan rutin antara kelompok kerja dan kelompok kegiatan. Dengan adanya pertemuan rutin yang dilaksanakan ini sebagai bentuk untuk mengulang dan menegaskan arah kebijakan program kampung keluarga berkualitas ini berada pada jalur yang sama. Pada tahap perencanaan awal untuk melaksanakan program

ini diawali dengan proses pemetaan potensi dan situasi masyarakat oleh PLKB kemudian PLKB bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan merangkul lintas sektor atau dinas-dinas yang ada di Kabupaten Magetan untuk bersama-sama menetapkan kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang menjadi masalah di masing-masing Desa tersebut, dalam hal ini Desa yang dimaksud adalah Desa Bedagung dan Desa Tapan. Setelah penetapan program atau kegiatan-kegiatan di Desa Bedagung dan Tapan tersebut, kemudian secara rutin dinas akan melaksanakan evaluasi setiap 6 bulan sekali. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dijalankan telah sesuai dengan dimensi kejelasan dan Konsistensi karena informasi kebijakan yang disampaikan telah dipahami oleh para pelaksana disetiap tingkat mulai dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, PLKB Kecamatan Lembeyan dan Panekan, Desa Tapan dan Bedagung hingga ke pemahaman masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Edward III dalam buku Tjilen (2019) dimana dalam penyampaian informasi harus jelas dan konsisten.

Untuk mendukung keterlaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas ini perlu adanya sumberdaya yang memadai di Desa Bedagung dan Desa Tapan. Sumberdaya disini berarti mulai dari sumberdaya manusianya, sarana dan prasarana yang ada serta sumberdaya dana Tjilen (2019). Sumber Daya Manusia disini mencakup kualitas dan kuantitas personel yang terlibat dalam Implementasi Program ini terdiri dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berperan aktif dalam pembinaan langsung kepada masyarakat dan terlibat dalam program tribina (BKB, BKL, BKR). Selain itu, kader dan masyarakat juga berperan penting dalam menyampaikan informasi dan mendukung pelaksanaan program,

menunjukkan keterlibatan aktif sumber daya manusia di tingkat desa. Tetapi kondisi saat ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Magetan mengalami kekurangan SDM pada Petugas PLKB. Di Desa Tapan, organisasi pendukung seperti kader dan masyarakat berperan aktif dengan dukungan dari pemerintah desa, memperlihatkan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak. Dari segi Dana, yang digunakan untuk mendukung program ini berasal dari Dana Desa (ADD) serta adanya swadaya dari masyarakat. prasarana yang ada di desa-desa tersebut juga mendukung implementasi program. Desa Bedagung memiliki sarana dan prasarana yang baik, termasuk kantor sekretariat, rumah dataku, serta kelompok-kelompok aktif seperti BKB, BKL, BKR, PIK-R, dan UPPKS. Di Desa Tapan, sarana kesekretariatan yang lengkap dengan kantor dan pengurus, didukung oleh dana dari ADD, menunjukkan bahwa sarana prasarana yang ada memadai untuk mendukung pelaksanaan program. Selain itu, fasilitas kesehatan yang ada di Desa Tapan dan Bedagung seperti polindes, posyandu Balita, posbindu, dan posbindu lansia digunakan untuk mendeteksi dini kesehatan masyarakat, mendukung program kesehatan dalam Kampung Keluarga Berkualitas.

Dalam pelaksanaan kebijakan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Magetan terkhususnya di Desa Bedagung dan Desa Tapan. Dimana, Dinas DPPKBPPPA sebagai leading sector menunjukkan komitmen untuk menjalankan program ini dengan bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Kerjasama lintas sektoral yang melibatkan pemerintah Desa, Polsek, Babinsa, Puskesmas, KUA, kader-kader, dan tokoh masyarakat menunjukkan sikap positif dan keterbukaan dari para pelaksana dalam mendukung tujuan program. Komitmen bersama dari berbagai pihak ini merupakan indikator disposisi yang kuat dalam implementasi kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap program Kampung Keluarga Berkualitas menunjukkan dinamika yang berkembang. Pada

tahap awal pembentukan, masyarakat masih dalam proses menerima program ini. Namun, seiring dengan pelaksanaan program, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keluarga berkualitas mulai meningkat. Reaksi yang berbeda-beda dari masyarakat pada awalnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk sosialisasi dan pemahaman mengenai manfaat program. Lambat laun, partisipasi masyarakat meningkat, menunjukkan adanya perubahan disposisi dari yang awalnya kurang menerima menjadi lebih mendukung program ini. Disposisi pelaksana dan masyarakat dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Magetan menunjukkan sikap yang positif dan komitmen yang kuat. Komitmen dari DPPKBPPPA dan kerjasama lintas sektoral menunjukkan sikap yang terbuka dan mendukung keberhasilan program. Penerimaan dan partisipasi masyarakat yang meningkat seiring dengan pelaksanaan program menunjukkan adanya perubahan disposisi yang lebih baik terhadap program ini.

Dalam melaksanakan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Magetan, terdapat Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat kabupaten dengan DPPKB sebagai leading sector. Struktur ini melibatkan berbagai dinas terkait atau lintas sektor, yang menunjukkan adanya organisasi yang terstruktur dan terintegrasi. Ini menunjukkan bahwa struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik telah dibentuk untuk mendukung implementasi program. Struktur kepengurusan Pokja yang dibentuk di tingkat desa, seperti di Desa Tapen dan Desa Bedagung, menunjukkan adanya prosedur operasional yang teratur. Pokja di tingkat desa bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan dan ditentukan. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap kegiatan dan program dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten

Magetan telah dibentuk dengan baik dan sesuai dengan teori implementasi kebijakan Edward III Tjilen (2019) Struktur organisasi yang melibatkan DPPKB sebagai leading sector dan dinas-dinas terkait lainnya menunjukkan adanya organisasi yang terstruktur dan terintegrasi. Prosedur dan mekanisme operasional yang didukung oleh surat keputusan dari bupati dan kepala desa memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam penerapannya secara berkelanjutan di Desa Bedagung dan Desa Tapen, Kabupaten Magetan, dapat disimpulkan bahwa program ini telah dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan ini dicapai melalui komunikasi efektif dan konsisten antara Dinas DPPKB3A, PLKB Kecamatan, kader di desa, dan masyarakat. Dari segi sumber daya manusia, partisipasi aktif dalam implementasi program terlihat jelas, didukung oleh dana dari Dana Desa (ADD) dan swadaya masyarakat, serta fasilitas memadai seperti kantor sekretariat dan layanan kesehatan. Meskipun Kabupaten Magetan kekurangan Petugas PLKB, masalah ini diatasi dengan kader di desa yang bertindak sebagai perpanjangan tangan PLKB.

Dari aspek pelaksanaan kebijakan, program ini menunjukkan komitmen tinggi dari berbagai pihak. Dinas DPPKBPPPA sebagai sektor utama bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, memperlihatkan sikap positif dan keterbukaan. Penerimaan masyarakat yang awalnya beragam meningkat seiring dengan pelaksanaan program, mencerminkan perubahan disposisi yang lebih mendukung. Kerjasama lintas sektor ini menunjukkan disposisi yang kuat dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik mendukung pelaksanaan program, dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat kabupaten dan desa yang

didukung oleh surat keputusan dari bupati dan kepala desa.

Secara keseluruhan, Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Berkelanjutan di Desa Bedagung dan Desa Tapen, Kabupaten Magetan, telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang didukung oleh komunikasi efektif, sumber daya memadai, disposisi positif dari pelaksana dan masyarakat, serta struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik. Meskipun ada tantangan seperti kekurangan Petugas PLKB, program ini tetap berjalan dengan dukungan dan kerjasama lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat.

REFERENSI

- Alfano, E., & Hamzah Hasyim, R. A. S. (2023). Evaluasi Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Rangka Pencegahan Stunting. *Jurnal Kesehatan*, 14.
- Apriyanto, M. R. (2023). *Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design : qualitative, quantitative and mixed methods approaches*.
- Denzin, N. K. (n.d.). *THE RESEARCH ACT, A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. MCGRAW-HILL BOOK COMPANY.
- Diskominfo. (2023). *Menilai Kampung Kb, Mengubah Kampung Lebih Berkualitas*. <https://Kominfo.Magetan.Go.Id/>.
- Hakim, M. K. (2023). *Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Ibrahim, S., & Zulhijjah, aryulhandy nur. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Abon Daging Kuda Merek "JEKA" oleh Sanggar Panrita di Kabupaten Jeneponto*. *Palangga Praja*, 5.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Productions.
- Purba, M. I. A. F. (2023). *Evaluasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara*.
- Syabani, S. (2021). *Implementasi Program Kampung Kb Dalam Di Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu*.
- Syahrudin, D. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Studi Kasus)* (Digital). Nusa Media.
- SYAWAL, J. (2019). *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Koto Ranah Core.Ac.Uk*. <https://core.ac.uk/download/pdf/300871255.pdf>
- Timisela, N. R. (2023). *Implementasi Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting . Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(4).
- Tjilen, A. P. (2019a). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*.
- Tjilen, A. P. (2019b). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)* (F. Papilaya (ed.)). CV Hikam Media Utama.

